

## Kinerja Pemerintahan Kota Bogor dalam Pembangunan Manusia untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor Tahun 2022

### *Bogor City Government Works on Human Development to Overcome Poverty and Unemployment in Bogor City 2022*

Alhilal Yusril Hawari<sup>1</sup>, Utang Suwaryo<sup>2</sup> dan Dede Sri Kartini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran  
Jalan Bukit Dago Utara No.25, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Telp. dan Fax. 022-2510276

(Diterima 20/07/23; Direvisi 28/09/23; Disetujui 05/10/23)

#### **Abstract**

*This research is motivated by problems that occurred in Bogor City, there are many unemployment and high level of poverty that happen in 2022,. The drop of human development index in 2020 are being judged to be the most impactful factor that rising the number of unemployment and number of poverty. Bogor government performance being one thing that can be seen to know how the role of government to overcome the problem. Therefore, the purpose of this research is to find out how bogor government work performances to overcome the rise of number unemployment and poverty in Bogor. In this research, descriptive method with qualitative approach was used. Data collection was obtained through formal and informal interview, and documentation. Informants were determined by purposive sampling in order to achieve the real data by interviewing informant that are responsible to the conditions. This Research used Wasistiono government organizations work performances theory to measure government work performances through some dimensional such as productivity, service quality, responsivity and responsibility. The researcher can conclude that Bogor government work performances are displeasing in terms of productivity, service quality, and responsivity to human development problems.*

**Keywords:** *government work performances, human development, poverty, unemployment.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di Kota Bogor yaitu banyaknya pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tinggi yang ada pada tahun 2022, turunnya angka indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 dinilai menjadi salah satu faktor berpengaruh yang menambah angka pengangguran dan angka kemiskinan. Kinerja Pemerintah Kota Bogor menjadi hal yang perlu dilihat untuk mengetahui peran dari pemerintahan dalam mengatasi hal tersebut, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan Kota Bogor dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di Kota Bogor. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Email: alhilalhawari122@gmail.com

wawancara formal dan informal, dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui terkait kondisi penelitian secara real. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi pemerintahan oleh Wasistiono untuk mengukur kinerja pemerintahan diukur melalui dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan tanggung jawab. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan adalah kinerja Pemerintah Kota Bogor belum memuaskan dari segi dimensi produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas terhadap permasalahan pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** kinerja pemerintahan, pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya, pembangunan suatu negara yang maju tentunya memerlukan adanya pembangunan manusianya itu sendiri dengan alasan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama dalam proses pembangunan yang terjadi (Kuncoro, 2004). Di Kota Bogor sendiri, pembangunan manusia dikatakan darurat hal ini disebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor menurun. Dari data yang didapat pada tahun 2020 IPM berada pada 76,11 poin, turun 0,12 poin dari tahun sebelumnya. Data ekonomi turun 6,57%, pengangguran naik 3,6%, serta kemiskinan 6,68%. Perubahan angka-angka tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah Kota Bogor.

Melihat bahwa pembangunan manusia merupakan prasyarat utama dari adanya pembangunan negara serta merupakan sumber daya utama yang paling penting. Dan juga melihat data dari RAPBN 2019 yang menjelaskan titik tekan pembangunan Indonesia akan tetap memfokuskan pada sektor manusia oleh karena hal tersebut maka pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 487,9 triliun untuk pendidikan dan Rp. 122 triliun untuk kesehatan serta Rp. 381 triliun untuk perlindungan sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2021, penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin berjumlah 28 juta orang (10,1%), naik sebesar 26,42 juta orang atau 9,78% dibanding Maret 2020. Pada periode tahun 2020 ke 2021 jumlah penduduk yang digolongkan miskin jumlahnya bertambah 1,1 juta orang. Pertambahan jumlah orang yang dikategorikan miskin juga terjadi di wilayah pedesaan dengan meningkat sejauh 110 ribu orang. Peningkatan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama karena ketidakstabilan ekonomi, tercatat bahwa ekonomi yang tumbuh di Indonesia terus mengalami fluktuasi yang dimulai sejak kuartal kedua hingga akhir tahun pada tahun 2020. Tercatat di tahun 2020, bahwa di Indonesia mengalami penurunan ekonomi hingga 2,2%. Hal ini disebabkan karena pengeluaran belanja rumah tangga yang menurun. Kedua, dikarenakan adanya inflasi yang terjadi, tercatat bahwa inflasi terjadi di tahun 2020 yang bergerak sebanyak 1,7% per tahunnya. Dan karena adanya kenaikan bahan pokok sebesar 3,5% dalam setahun yang dinilai menjadi penyebab lainnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan angka inflasi yang dilihat dari sisi permintaan hanya dapat tumbuh di angka 2%, hal tersebut dikarenakan kebutuhan yang melemah dan daya beli masyarakat tidak mampu. Alasan ketiga, dikarenakan jumlah pengangguran terbuka yang meningkat. Kenaikan ini tercatat pada bulan Agustus 2020 sebesar 7%, lebih tinggi daripada angka pada tahun 2019 yang hanya sekitar 5%. Selanjutnya adalah adanya jumlah pengangguran yang sangat besar hingga 2,6 juta orang pengangguran. Jumlah orang yang tidak bekerja meningkat hampir 2 juta jiwa, 700 ribu jiwa yang masuk ke angkatan kerja,

dan ada masyarakat yang terkena pengurangan kerja hingga 25 juta jiwa. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pengangguran yang dikatakan baru saat pandemi karena mereka kehilangan pemasukan dan menjadi miskin (Witono, 2020).

Berdasarkan tingkat provinsi, Jawa Barat masih menjadi provinsi kedua terbesar dengan angka kemiskinan setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang. Beberapa faktor penyebab dari tingginya angka kemiskinan yang ada di Jawa Barat adalah tingkat pendapatan rumah tangga sangat rendah bahkan tidak mempunyai pendapatan sama sekali, tidak memiliki pendidikan sekolah baik formal maupun informal, rendahnya tingkat kesehatan dan akses kepada fasilitas kesehatan, serta terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan.

Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dampak pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak tahun 2020 sangat signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi menyebabkan munculnya 28 juta angkatan kerja baru, hal ini menjadi faktor hadirnya angka pengangguran hingga 7% (Sejati, 2020).

Kenaikan angka tersebut terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang mendorong perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan banyak pengusaha yang tidak mampu bertahan karena minimnya pembeli serta pendapatan yang terhenti. Tercatat bahwa selama tahun 2020 jumlah pengangguran mencapai 10 juta orang, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9,5 juta orang.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor

Kota Bogor	2020	2021	2022
	14.29%	8.92%	12.6%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Tabel 1 menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor sejak tahun 2020 hingga 2022. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020 jumlahnya 14.29% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 8.92%. Pada tahun 2022 jumlahnya kembali meningkat menjadi 12.6%. Menurut Bima Arya, terdapat 175.000 orang di Kota Bogor yang menganggur. Situasi ini menyebabkan berbagai sektor terkena dampak, bahkan berkurangnya mata pencaharian hingga hilangnya mata pencaharian bagi banyak orang. Penelitian ini penting dilakukan karena akan melihat kinerja pemerintah Kota Bogor dalam pembangunan manusia untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, Penelitian ini akan melihat kinerja Pemerintah Kota Bogor berdasarkan teori organisasi pemerintahan yang dijelaskan oleh Wasistiono (2002) yang mengukurnya dengan dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas dan responsibilitas.

## 2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi pemerintahan menurut Wasistiono (2002), teori ini mencakup empat dimensi, yaitu (1) dimensi produktivitas; (2) dimensi kualitas layanan; (3) dimensi responsivitas; (4) dimensi responsibilitas. Empat dimensi ini dianggap penting dan mampu untuk menilai kinerja organisasi pemerintahan.

Setiap dimensi selanjutnya diturunkan melalui beberapa indikator. Dimensi produktivitas dapat dilihat berdasarkan indikator efektifitas dan efisiensi kegiatan. Dimensi kualitas layanan dapat dilihat berdasarkan indikator kualitas pelayanan kegiatan. Dimensi responsivitas dapat dilihat dari indikator kebutuhan masyarakat. Dimensi responsibilitas dapat dilihat dari indikator kesesuaian dengan kebijakan.

Produktivitas sendiri menurut Zulhanafi dan Hasdi Aimon (2013) dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kemudahan dalam akses belajar, akses dalam mengasah kemampuan, gaji, kebersihan, pekerjaan, sarana prasarana, kesempatan berkarya. Produktivitas memiliki makna sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan nilai dalam diri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan cara efisien. Hal ini dijelaskan sebagai hubungan antara masukan dan keluaran akibat dari sebuah sistem produksi. Bahwa dijelaskan hal itu merupakan ukuran antara keluaran yang dibagi dengan masukan. Karena apabila lebih banyak yang dikeluarkan daripada masukan maka disebut produktif. Namun apabila lebih banyak masukan daripada pengeluaran maka dinyatakan tidak produktif. Sementara itu, indikator efektifitas kegiatan dijelaskan sebagai sebuah hasil dari capaian yang dinilai untuk melihat bagaimana suatu kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan (Atmaja *et al.*, 2018)

Indikator efisiensi kegiatan merupakan metrik yang digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah biaya atau sumber daya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dikatakan efisien adalah kegiatan yang menggunakan sedikit sumber daya dalam mencapai hasil yang dituju. Efisiensi kegiatan berkaitan dengan *input-output*. Suatu hal yang dikatakan efisiensi adalah sesuatu yang mencapai *output* atau hasil yang diukur dengan *input*. Yunina (2019) menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja, waktu, material. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya atau biaya yang dikeluarkan.

Dimensi kualitas layanan memiliki sumber daya utama yaitu pengukuran dan penilaian pengguna jasa atau masyarakat. Uji silang dilakukan dengan cara mengecek laporan dan dokumen organisasi mengenai pelayanan yang diberikan. Kualitas layanan adalah sebuah hal yang dinilai bermanfaat di pemerintahan, karena kualitas layanan dapat memperlihatkan persepsi dari publik terhadap organisasi atau institusi pemerintah dalam hal capaian kinerja (Hasan, 2014).

Kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang dikeluarkan oleh birokrat terhadap masyarakat (Kurniawan, 2017). Selanjutnya kualitas pelayanan publik dijelaskan juga sebagai usaha untuk memfokuskan kegiatan, karena kualitas pelayanan menjadi indikator utama yang dapat dilihat dari berhasilnya suatu kegiatan (Hardiyansyah, 2018). Kualitas layanan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek yang diperlihatkan dan diutamakan oleh aparat pemerintah berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kualitas pelayanan kegiatan adalah upaya yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (*customer*) serta ketepatan penyampaian dalam proses mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan kegiatan dapat berarti ukuran pelayanan yang diinginkan oleh publik atas pelayanan yang diberikan agar memuaskan pelanggan (Yayat, 2017). Kualitas pelayanan kegiatan yang dikatakan memuaskan atau baik adalah pelayanan kegiatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh pelanggan sesuai dengan harapan atau memuaskan. Namun, apabila pelayanan yang diterima pelanggan tidak

memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan kegiatan tersebut tidak memuaskan atau buruk.

Kualitas pelayanan kegiatan adalah suatu kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang memiliki dasar yang tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan dari suatu proses produksi dan juga tidak dikaitkan terhadap suatu produk fisik (Sumantri, 2014). Melihat penjelasan mengenai kualitas pelayanan kegiatan, kualitas pelayanan kegiatan adalah penilaian usaha pemenuhan dan kebutuhan masyarakat terhadap keinginan dan harapan.

Dimensi selanjutnya yaitu responsivitas yang memiliki pengertian dari bagaimana suatu institusi dapat mengenali keinginan masyarakat dan kebutuhan mereka untuk dapat terpuaskan baik dari aspek pelayanan yang tepat, cepat, hemat, mudah yang dapat diberikan kepada publik (Samsudin, 2021). Responsivitas juga dapat diartikan sebagai indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

Responsivitas juga dinilai sebagai kehandalan institusi untuk dapat mengetahui hal yang diperlukan oleh publik dengan cara melihat langsung hal yang diperlukan dan cara agar hal tersebut dapat bertahan dan terus berkembang (Samsudin, 2021). Sedangkan menurut Nurani *et al.* (2015), responsivitas adalah kemampuan institusi untuk dapat mengetahui, menyediakan dan melayani kebutuhan utama masyarakat.

Indikator dalam dimensi responsivitas adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat memiliki pengertian sebagai segala sesuatu hal yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara alamiah untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan masyarakat dapat terdiri dari beberapa bentuk dan jenis serta dibedakan dari tingkat kepentingan, waktu, sifat serta subjeknya.

Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi baik dalam bentuk barang, jasa, sesuatu yang memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud. Kebutuhan adalah sesuatu yang dijalankan berdasarkan aturan untuk melihat kepentingan yang diutamakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan didefinisikan sebagai upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi apa yang tidak dimiliki, dilihat dari keinginan yang ingin dilaksanakan terlebih dahulu (Gunawijaya, 2017)

Dimensi terakhir yaitu tanggungjawab memiliki pengertian sebagai upaya pertanggungjawaban institusi terhadap keinginan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pokok fungsi yang dijalankan yang memiliki hubungan dengan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin.

Rini (2019) juga menyebutkan bahwa tanggungjawab memiliki pengertian terkait sejauh mana upaya yang dilaksanakan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh institusi sejalan dengan kepentingan masyarakat. Baik secara eksplisit maupun implisit, dengan itu maka tanggungjawab dapat bersinggungan bersama responsivitas.

Tanggungjawab adalah upaya penilaian terhadap kewajiban suatu institusi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Upaya yang dilakukan adalah menggerakkan, dan menghitung dalam artian menilai kemampuan yang dimiliki oleh institusi pemerintah untuk menjalankan kewajiban yang dimiliki berdasarkan sumber daya yang digunakan. Kewajiban diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target, menjalankan kewajiban diartikan sebagai usaha fokus pemerintah untuk memperlihatkan kepedulian yang dijalankan dengan sungguh-sungguh (Afrizal *et al.*, 2021)

Indikator dalam dimensi responsibilitas adalah kesesuaian dengan kebijakan. Hal ini memiliki pengertian keselarasan atau kecocokan dengan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dari organisasi. Aturan tertulis yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat. Kesesuaian dengan kebijakan menjadi rujukan utama pada anggota organisasi atau anggota masyarakat yang ada (Chevalier *et al.*, 2013)

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas topik kinerja pemerintahan. Penelitian berjudul Kinerja Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Relokasi Pasar Barito) yang dilakukan oleh Poetra (2014). Penelitian ini berfokus pada kinerja birokrasi pemerintahan yang dipandang dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas menurut teori Agus Dwiyanto. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah teori yang digunakan yaitu peneliti menggunakan teori Sadu Wasistiono (2002) dengan berfokus kepada dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas dengan indikator efektifitas dan efisiensi kegiatan, kualitas pelayanan kegiatan, kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan kebijakan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data dan informasi terkait kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam pembangunan manusia untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor tahun 2022, secara mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurmalasari & Erdiantoro (2020) bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian secara rinci, mendalam, dan sesuai dengan realitas. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara secara formal dan informal (Prasetya & Hidayat, 2020) serta studi dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Validasi data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Creswell, 2014). Analisis data dilakukan dengan mereduksi data untuk pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data, lalu dilakukan penyajian data untuk menarik kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang dapat dinilai dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan, diantaranya adalah garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta gini rasio.

Pada tahun 2022 Kota Bogor melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan. Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan secara umum dari 80,09 ribu jiwa menjadi 79,15 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrim (penduduk yang memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari US 1,9\$). Jumlah penduduk miskin ekstrim naik menjadi 14,45 ribu jiwa dari sebelumnya di angka 13,59 ribu jiwa.

Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor Tahun 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	392.405	7,92	7,60
2016	416.779	77,30	7,29
2017	450.078	76,50	7,11
2018	480.749	64,85	5,93
2019	513.343	63,97	5,77
2020	547.399	75,04	6,68
2021	571.734	80,09	7,24
2022	608.949	79,50	7,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Melihat pada Tabel 2, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2022 angka garis kemiskinan terus meningkat. Jumlahnya meningkat dari angka 392.405 pada tahun 2015 menjadi 608.949 pada tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin bersifat fluktuasi naik turun, namun dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 angka penduduk miskin mencapai di angka 75.04 dan meningkat 79.50 pada tahun 2022. Meskipun demikian persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga 2022.

Berdasarkan angka proyeksi penduduk, Kota Bogor memiliki jumlah penduduk sebesar 1.063.513 jiwa, dengan Kecamatan Bogor Tengah merupakan kecamatan terpadat yang tercatat sebesar 11.505 jiwa/km<sup>2</sup>. Rasio jenis kelamin di Kota Bogor sebesar 103 dan laju pertumbuhan penduduk di angka 1,06%. Pada tahun 2022 hasil Sakernas mencatat angkatan kerja yang ada di Kota Bogor mencapai hingga 556.541 jiwa, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kota Bogor tercatat sebesar 89,22%. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor mencapai 10,78% terhadap angkatan kerja.

Tabel 3. Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020-2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja		
	2020	2021	2022
SD	22	7	6
SLTP	86	29	19
SLTA	2.158	931	616
SMK/Sederajat	1.692	2038	2.298
D-1	20	10	9
D-2	2	2	4
D-3	165	109	95
D-4	28	16	11
S-1	396	494	160
S-2	3	6	1
S-3	0	0	1
Jumlah	4.572	3.632	3.220

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan data pada Tabel 3 bahwa jumlah pencari kerja di Kota Bogor sebesar 4.572 orang, pada tahun 2021 sebanyak 3.632 orang dan tahun 2022 tercatat sebanyak 3.220 orang. Dengan angka pencari kerja terbanyak ada di tingkat pendidikan SMK/Sederajat dengan angka 2.298 orang.

Tabel 4. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kecamatan di Kota Bogor, 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja		
	2020	2021	2022
Bogor Selatan	835	571	528
Bogor Timur	393	295	231
Bogor Utara	807	667	638
Bogor Tengah	575	411	341
Bogor Barat	1099	908	812
Tanah Sareal	863	780	670
Jumlah	4.572	3.632	3.220

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Melihat Tabel 4, jumlah pencari kerja dari tahun 2020 sampai tahun 2022 cenderung menurun. Tahun 2020 jumlah pencari kerja di Kota Bogor sebesar 4.572 orang, 2021 sebanyak 3.632 orang, dan tahun 2022 tercatat sebesar 3.220 orang. Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah dengan jumlah pencari kerja paling tinggi dari tahun 2020 hingga ke 2022.

Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Kota Bogor, 2022

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Sekolah Dasar	115.073	10.163	125.236	91,88
Sekolah Menengah Pertama	78.754	5.569	84.323	93,40
Sekolah Menengah Atas	183.510	37.652	221.162	82,98
Perguruan Tinggi	119.233	6.587	125.820	94,76
Jumlah Total	496.570	59.971	556.541	89,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan Tabel 5, kita dapat melihat bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor menjadi lulusan terbanyak yang bekerja dengan jumlah total 183.510 orang namun yang menganggur sebanyak 37.652 orang. Dalam konteks skala ukuran pendidikan, terdapat lebih banyak lulusan sekolah menengah atas menjadi bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja lainnya. Bahwa lulusan sekolah menengah atas yang bekerja sebanyak 183.510

orang dan yang menganggur sejumlah 37.652 orang. Sedangkan persentase bekerja terhadap angkatan kerja yang tertinggi berada pada lulusan sarjana dengan jumlah persentase mencapai 94,76%. Dan yang paling rendah adalah lulusan sekolah menengah atas yang hanya berada di angka 82,98%.

Untuk melihat kinerja organisasi Pemerintah Kota Bogor dalam pembangunan manusia dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui dimensi sebagai berikut: (1) Produktivitas dengan indikator efektifitas dan efisiensi kegiatan; (2) Kualitas layanan dengan indikator kualitas pelayanan kegiatan; (3) Responsivitas dengan indikator kebutuhan masyarakat; (4) Responsibilitas dengan indikator kesesuaian dengan kebijakan.

#### **4.1 Produktivitas Pemerintah Kota Bogor dalam Pembangunan Manusia untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor Tahun 2022**

Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2022 dipimpin oleh Bima Arya-Dedie Abdu Rachim selaku Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor. Pasangan Bima-Dedie menjabat pada periode 2019-2024. Pemerintah Kota Bogor dibantu oleh Sekretaris Daerah yang membantu untuk mengurus bidang pemerintahan, hukum dan politik, bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Pemerintah Kota Bogor juga didukung dengan struktur kelompok jabatan fungsional lainnya seperti Kepala Dinas, Camat dan Lurah. Pemerintahan Bima Arya-Dedie A Rachim merupakan periode kedua kepemimpinan yang sebelumnya telah menjabat pada periode 2014-2019. Produktivitas yang dilaksanakan sebagai upaya pembangunan manusia untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2022 tercermin dalam strategi penanggulangannya. Strategi penanggulangan tersebut adalah menurunkan beban keluaran anggaran, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, memberikan jaminan sosial (Jamsos), menyediakan Jaring Pengaman Covid-19, menyederhanakan program, memperluas manfaatnya, menyempurnakan sasaran program, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan usaha masyarakat, memberikan kemudahan bagi pekerja di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor dalam hal produktivitas memiliki beberapa program kerja sebagai upaya pembangunan manusia untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Program kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor. Program-program yang dilaksanakan adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Penerima Bantun Iuran (BPJS PBI), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Alat Bantu, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), bantuan dalam bentuk barang (Natura), bantuan sembako, Program Penempatan Kerja, Program Pelatihan Kerja, Program Hubungan Industrial dan Kelembagaan Kerja, Program Bogor Motivator Ketahanan Keluarga.

Kota Bogor mempunyai program Bogor Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar). Efektifitas program terdapat pada program Bogor Motekar, yaitu upaya penciptaan lapangan kerja dengan target program 20.000 lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja yang disediakan sangat tepat untuk penyerapan tenaga kerja baik dari kalangan umum maupun non-umum dengan total jumlah sebanyak tujuh ribu pekerja. Program ini dilaksanakan melalui program padat karya. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan untuk membantu para pekerja yang terdampak Covid-19. Dari target 20.000 lapangan pekerjaan hanya mampu memenuhi 10.201 lapangan pekerjaan. Fokus lainnya adalah masyarakat yang belum menerima bantuan sebelumnya. Kegiatan lainnya adalah memberikan pelatihan kepada 3.700 pekerja (informal) dan kesempatan untuk bekerja melalui perusahaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu

(PKWT). Selain itu terdapat program magang untuk 3.400 orang diperusahaan secara individu.

Selanjutnya dalam hal efisiensi kegiatan, Pemerintah Kota Bogor telah berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembangunan manusia khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut. Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah program pemagangan dengan melibatkan 288 orang peserta. Kerjasama tersebut dilakukan dengan Bank BCA, PT. Unitex, LPK Zen, LPK Juritsu. Selain itu, dilaksanakan juga *jobfair* yang dihadiri oleh 19.836 peserta, guna memberikan peluang kerja yang lebih luas lagi bagi masyarakat setempat.

#### **4.2 Kualitas Layanan Pemerintah Kota Bogor dalam Pembangunan Manusia untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor Tahun 2022**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah terhadap masyarakat kerap kali mendapatkan penilaian yang tidak memuaskan. Penilaian tersebut diberikan oleh masyarakat karena merasakan pelayanan yang kurang maksimal. Penyebab terjadinya hal ini dapat berasal dari berbagai faktor selain keterbatasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun sejatinya aparatur pemerintah memiliki visi untuk menciptakan pelayanan yang bermutu, handal serta berkualitas.

Kualitas layanan selalu menjadi isu penting di masyarakat. Kualitas layanan dapat membentuk citra negatif terhadap organisasi pemerintahan akibat ketidakpuasan pelayanan yang diterima masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pelayanan memiliki peran krusial dalam menjalankan serta mengukur kinerja organisasi pemerintahan.

Kota Bogor telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan pemerintahan terkait pembangunan manusia untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tercermin dari kenaikan predikat kinerja reformasi birokrasi dari B menjadi BB Sangat Baik, peningkatan IPM dari 76,59 pada tahun 2021 menjadi 77,17 pada 2022. Selain itu, terdapat penurunan angka pengangguran (TPT turun dari 11,79% pada tahun 2021 menjadi 10,78% per Agustus 2022). Tidak hanya itu, penurunan *gini ratio* juga mengalami penurunan dari 0,441 pada tahun 2021 menjadi 0,430 pada tahun 2022.

Kualitas pelayanan kegiatan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menitikberatkan pada ketepatan dalam proses penyampaian guna mengimbangi keinginan atau harapan pelanggan. Kualitas pelayanan kegiatan mencerminkan tingkat keunggulan dalam upaya dan proses memenuhi keinginan pelanggan.

Kualitas pelayanan kegiatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagaimana proses melayaninya yang dijalankan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Kualitas pelayanan kegiatan dapat berarti tingkat keunggulan yang diharapkan oleh pelanggan serta pengendalian atas tingkat keunggulan dalam proses memenuhi keinginan pelanggan

Dinas Sosial Kota Bogor menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Khususnya dalam upaya pemberian layanan melalui program sembako, bantuan langsung tunai, BPJS penerima bantuan iuran, bantuan natura, program keluarga harapan, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, maupun pemberdayaan masyarakat miskin. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan memerhatikan mutu dan kualitas dari pelayanan tersebut. Hal ini terbukti dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau (IKM) Dinas Sosial yang mencapai angka 3,53 atau dikonversikan menjadi

88,31. Nilai tersebut menunjukkan mutu pelayanan yang mendapatkan nilai A dengan nilai kinerja unit yaitu pelayanan sangat baik

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor menyediakan pelayanan bagi para pekerja yang ingin bekerja seperti Kartu Kuning atau AK-1. Masyarakat yang ingin membuat kartu ini dapat mendatangi kantor secara langsung ke kantor atau melakukan proses secara *online*. Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor secara online dilaksanakan melalui situs web resmi bogorkerja. Pada platform tersebut, pengguna jasa layanan dapat mengambil kartu tersebut di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor. Masyarakat juga dapat mengurus secara langsung dengan membawa perlengkapan seperti *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* akta kelahiran, dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk

#### **4.3 Responsivitas Pemerintah Kota Bogor dalam Pembangunan Manusia untuk mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor Tahun 2022**

Responsivitas adalah upaya organisasi untuk dapat mengenali dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini responsivitas akan dilihat dari bagaimana Pemerintah Kota Bogor dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan manusia untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi. Responsivitas Pemerintah Kota Bogor terlihat dalam upaya memberikan bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas, memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan natura, memberikan pendampingan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan secara berkelanjutan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Kota Bogor telah menunjukkan responsivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai bantuan. Bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial Kota Bogor adalah Bantuan Sosial, Bantuan Program BPJS Penerima Bantuan Iuran, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketenagakerjaan melakukan program transmigrasi masyarakat ke Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 1. Program Transmigrasi Masyarakat Kota Bogor ke Mamuju, Sulawesi Barat  
*Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor, 2023*

Program Transmigrasi merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat mencari penghidupan yang lebih baik dengan cara pindah tempat atau dapat mencari kesempatan kerja yang lebih baik (memindahkan status). Gambar 1 merupakan

program transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Gambar 1 merupakan dokumentasi 5 (lima) keluarga yang mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Keluarga yang diberangkatkan merupakan masyarakat Kota Bogor yang mendaftarkan diri dan telah terdaftar pada program transmigrasi. Program transmigrasi ini menyediakan fasilitas, pelatihan, lahan bagi mereka untuk dapat berusaha di Kabupaten Mamuju. Keberangkatan transmigran ini dilaksanakan mulai tanggal 29 November 2021 hingga 3 Desember 2021. Program Transmigrasi ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 2021.

Selain program transmigrasi, Pemerintah Kota Bogor juga merespon cepat kebutuhan masyarakat terkait permasalahan pengangguran melalui kerjasama antara PT. OS. Selnjaya dengan Dinas Ketenagakerjaan. Program yang dilaksanakan adalah pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Selain menyediakan program transmigrasi dan hubungan industrial, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga responsif dengan menyediakan *website* bogorkerja. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, hadirnya *website* ini dapat membantu menyediakan pembuatan Kartu Kuning, Pembuatan *Curriculum Vitae*, informasi lowongan pekerjaan yang *update*, serta tersedianya *Whatsapp* Grup



Gambar 1. Aplikasi SiBadra  
Sumber: Hasil olahan data penelitian,2023

Pemerintah Kota Bogor dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat berupaya dengan mencoba menghadirkan aplikasi yang terintegrasi untuk memberikan pengaduan dan saran bernama Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra). Gambar 2 merupakan tampilan aplikasi SiBadra yang dapat diakses melalui gawai.

Aplikasi SiBadra merupakan upaya responsivitas pemerintah Kota Bogor yang responsif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun kota, Masyarakat dapat menyampaikan laporan, aduan dan keluhan yang dilengkapi dengan bukti. Hasil laporan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Pemanfaatan aplikasi SiBadra melalui aplikasi di gawai maupun *website* telah bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aduan yang meresahkan mereka dengan cepat dan mudah. Penyediaan aplikasi SiBadra merupakan upaya responsivitas Pemerintah Kota Bogor dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

#### **4.4 Responsibilitas Pemerintah Kota Bogor dalam Pembangunan Manusia untuk mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor Tahun 2022**

Responsibilitas merupakan upaya pertanggungjawaban dari institusi pemerintah terhadap keinginan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin yang diatur dalam tupoksi yang telah ada. Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya responsibilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam pembangunan manusia khususnya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Upaya responsibilitas tersebut dilakukan dengan menyusun kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang berkolaborasi dengan pemerintahan pusat maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui Keputusan Wali Kota Kota Bogor Nomor 400.45-192 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor. Berdasarkan kebijakan tersebut, Wakil Walikota Bogor mendapatkan mandat sebagai Ketua Tim Koordinasi Kemiskinan Kota Bogor. Wakil Walikota Bogor memimpin upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi. Strategi yang dijalankan meliputi kerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Kolaborasi dengan berbagai pihak swasta dilaksanakan dengan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga kemasyarakatan, lembaga amil zakat seperti BAZNAS, pemerhati masalah sosial, civitas akademika, media dan organisasi masyarakat (ormas). Semua tindakan ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada kebijakan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor selalu meningkatkan rasa tanggungjawab dalam upaya responsibilitas terhadap tugas yang dilaksanakan. Wali Kota Bogor, Bima Arya mewujudkan hal tersebut dengan menyampaikan edukasi dan pengarahan langsung kepada Dinas Sosial di awal tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bogor juga telah melakukan upaya responsibilitasnya dalam hal mengurangi angka pengangguran. Upaya tersebut mengikuti arahan yang telah diatur dalam Perwali Bogor Nomor.70 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2019-2024. Renstra ini memiliki sasaran untuk meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, menyelesaikan kasus ketenagakerjaan, meningkatkan partisipasi transmigran yang mengikuti transmigrasi, meningkatkan daya saing tenaga kerja

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan oleh peneliti secara komprehensif, disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam aspek produktivitas dengan indikator efektifitas dan efisiensi kegiatan belum optimal dan memerlukan peningkatan. Hal tersebut belum optimal dikarenakan angka Kemiskinan yang masih tinggi yaitu mencapai 79.015 jiwa serta penambahan penduduk miskin ekstrim di angka 14.450 ribu

jiwa dari yang sebelumnya berjumlah 13.590 ribu jiwa. Selain itu terdapat 59.971 ribu jiwa yang masuk ke dalam tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor. Penyebab lain dari belum optimalnya kinerja ini adalah belum tercapainya efektifitas dan efisiensi program Bogor Motekar. Dari target 20.000 lapangan pekerjaan hanya mampu memenuhi 10.201 lapangan pekerjaan. Aspek produktivitas memerlukan peningkatan karena dalam angka Indeks Pembangunan Manusia yang masih perlu ditingkatkan, seperti pada tahun 2020 dengan angka 76,11%, tahun 2021 dengan angka 76,59%, dan tahun 2022 berada pada angka 77,17%. Disarankan untuk meningkatkan pemberian pelatihan kompetensi pada masyarakat dan optimalisasi serapan anggaran dalam program kerja.

Aspek kualitas pelayanan dengan indikator kualitas pelayanan kegiatan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat keterbatasan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Dibutuhkan peningkatan yang signifikan dalam hal pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tahunnya. Berdasarkan survei kepuasan terhadap masyarakat pada tahun 2022 mendapat nilai rata-rata 3.35 atau setara predikat B. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dan perlu dilakukan peningkatan dalam pengelolaan *website* bogorkerja agar dapat memberikan informasi-informasi terbaru.

Aspek Responsivitas dengan indikator terpenuhinya kebutuhan masyarakat sudah optimal dan memerlukan peningkatan. Dikatakan sudah optimal karena pemanfaatan aplikasi SiBadra sebagai upaya responsivitas telah bisa dilakukan dengan optimal. Dikatakan perlu peningkatan karena program bantuan yang diselenggarakan masih perlu adanya peningkatan verifikasi data agar bisa tepat sasaran. Dikatakan memerlukan peningkatan karena *website* bogorkerja yang dapat melakukan pembuatan kartu kuning, pembuatan cv, adanya grup whatsapp untuk pencari kerja secara daring perlu untuk update informasi setiap harinya. Meningkatkan program transmigrasi dari yang sebelumnya berhasil mengirimkan lima keluarga dari Bogor ke Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk terus bisa bertambah di kemudian tahun. Serta perlu adanya update informasi kerjasama dengan stakeholder untuk program transmigrasi ke negara-negara lain selain Jepang.

Dalam aspek Responsibilitas dengan indikator kesesuaian dengan kebijakan dikatakan sudah optimal namun perlu peningkatan, sudah optimal karena melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RPJMD Kota Bogor, Dikatakan perlu peningkatan karena masih adanya temuan berupa kurang bayar, hutang atau ketentuan pembayaran yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kepada stakeholder yang melaksanakan program kegiatan publik.

Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam pembangunan manusia untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan pada Tahun 2022 dalam hal Produktivitas dapat ditingkatkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJK) yang harus disusun berdasarkan evaluasi kinerja setelah kegiatan dilaksanakan. Dengan cara evaluasi ini diharapkan target yang belum maksimal tercapai di tahun 2022 dapat tercapai dengan maksimal di tahun 2023 (Abdurrahman, 2017). Dalam hal Kualitas Pelayanan melakukan pembaharuan bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam hal responsivitas mengenai kebutuhan masyarakat perlu memperbaiki aplikasi SiBadra. Dalam hal responsibilitas dapat ditingkatkan dengan memberikan arahan-arahan di setiap awal tahun kepada para aparatur pemerintah untuk meningkatkan kepeduliannya akan tanggungjawab moral jabatan yang diamanahkan kepadanya serta menyusun rencana anggaran dengan baik agar tidak ada hutang, kurang bayar atau pembayaran yang belum dilaksanakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, J. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai di Kantor Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 151-165.
- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60-67. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864>
- Atmaja, A. T., Santoso, D., & Ninghardjanti, P. (2018). Penerapan Sistem Otomatisasi Administrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja di Bidang Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 2(2), 1-14.
- Chevalier, A., Harmon, C., O' Sullivan, V., & Walker, I. (2013). The Impact of Parental Income and Education on the Schooling of Their Children. *IZA Journal of Labor Economics*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.1186/2193-8997-2-8>
- Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. *Sage Productions*, 12(5), 1-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 131. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921>
- Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. *Binadarma*. [http://eprints.binadarma.ac.id/3820/%0Ahttp://eprints.binadarma.ac.id/3820/1/Kualitas Pelayanan Publik.pdf](http://eprints.binadarma.ac.id/3820/%0Ahttp://eprints.binadarma.ac.id/3820/1/Kualitas%20Pelayanan%20Publik.pdf)
- Hasan, Y. (2014). Analisis Kinerja Instansi Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja (Kajian dalam Manajemen Publik). *Uinib*, 5(9), 143-162. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/652>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569-586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015). Responsivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif New Public Service. *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 18(04), 213-220. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.1>
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan dan Keputusan Karier: Konsep Krusial dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44-51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Poetra, R. M. (2014). *Kinerja Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Padjadjaran.
- Prasetya, A., & Hidayat, D. (2020). Pengalaman Pekerja Informal di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Bandung. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, 2(2), 16-32. <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/300/238>
- Rini, R. (2019). Pengaruh Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 329-332.

- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028–1034. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>
- Sejati, D. P. (2020). Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 98–105. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.313>
- Statistik, B. P. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Sumantri, B. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat dan Keputusan menjadi Nasabah di Bank Syariah. *Jurnal Economia*, 10(2), 141–147.
- Wasistitiono. (2002). *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*. CV FOKUSMEDIA.
- Witono, T. (2020). Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 16(2), 57–72. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/2901>
- Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gamping. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 56–65. <http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- Zulhanafi, Hasdi Aimon, E. S. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 85–109. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2739/2336>